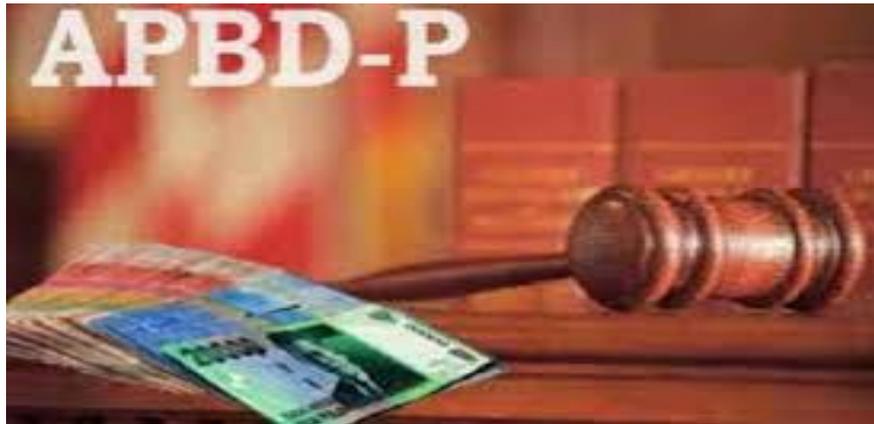


DPRD WONDAMA SEPAKATI APBD PERUBAHAN 2024 Rp1,2 TRILIUN



Fajar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Wondama, Papua Barat, telah secara resmi menyetujui dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 dengan total anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Ketua DPRD Teluk Wondama, Herman Sawasemariay, menyampaikan bahwa APBD awal Teluk Wondama 2024 berjumlah Rp1,080 triliun dan mengalami kenaikan menjadi Rp1,2 triliun dalam APBD Perubahan. DPRD Teluk Wondama telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam sidang paripurna penetapan APBD Perubahan Teluk Wondama. APBD Perubahan mencakup pendapatan daerah yang awalnya sebesar Rp1,080 triliun bertambah Rp63,488 miliar menjadi Rp1,143 triliun. Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp1,080 triliun menjadi Rp1,202 triliun, setelah ditambah Rp122,240 miliar. "Postur APBD Perubahan 2024 kami anggap sudah sesuai dengan kapasitas keuangan daerah serta selaras dengan prioritas dan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2024," jelasnya.

Herman Sawasemariay menekankan bahwa Kabupaten Teluk Wondama masih menghadapi berbagai masalah daerah yang memerlukan perhatian khusus, seperti tingginya angka kemiskinan, masalah kemiskinan ekstrem, dan stunting. Selain itu, terdapat lambatnya pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta keterbatasan infrastruktur dan lapangan kerja yang terbatas, serta kesenjangan antar wilayah yang masih signifikan. "Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan APBD Perubahan yang telah disepakati ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk mengatasi berbagai masalah daerah yang telah disebutkan," tambahnya.

Bupati Teluk Wondama, Hendrik Mambor, mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memantau pelaksanaan APBD Perubahan 2024 agar dapat dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Menurutnya, program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD Perubahan 2024 adalah prioritas yang dapat mendorong roda pemerintahan dan perekonomian daerah. "Harapan kami adalah APBD

Perubahan ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya. Penetapan APBD Perubahan 2024 ini adalah agenda terakhir DPRD Teluk Wondama untuk periode 2019-2024, yang masa tugasnya akan berakhir pada 16 September 2024.

Sumber Berita:

Harian Antara Papua Barat, “DPRD Wondama sepakati APBD Perubahan 2024 Rp1,2 Triliun,” tanggal 8 September 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan/atau
 - e) keadaan luar biasa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadiprioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.